



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
dan  
WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
- Laporan realisasi anggaran;
  - Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - Neraca;
  - Laporan operasional;
  - Laporan arus kas;
  - Laporan perubahan ekuitas; dan
  - Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp689.222.919.606,62	
b. Belanja	Rp795.954.479.299,97	
c. Transfer	<u>Rp706.056.990,00</u>	
Surplus/(defisit)		(Rp107.437.616.683,35)

d. Pembiayaan

- Penerimaan	Rp206.823.642.918,43	
- Pengeluaran	<u>Rp0,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp206.823.642.918,43

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp1.758.822.879,38) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan		
setelah perubahan	Rp690.981.742.486,00	
b. Realisasi	<u>Rp689.222.919.606,62</u>	
Selisih Lebih/(kurang)		(Rp1.758.822.879,38)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp87.024.158.555,13) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja		
setelah perubahan	Rp882.978.637.855,10	
b. Realisasi	<u>Rp795.954.479.299,97</u>	
Selisih Lebih/(kurang)		(Rp87.024.158.555,13)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi belanja transfer sejumlah (Rp29.590.536,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Transfer		
setelah perubahan	Rp735.647.526,00	
b. Realisasi	<u>Rp706.056.990,00</u>	
Selisih Lebih/(kurang)		(Rp29.590.536,00)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp85.294.926.211,75 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Surplus/defisit		
setelah perubahan	(Rp192.732.542.895,10)	
b. Realisasi	<u>(Rp107.437.616.683,35)</u>	
Selisih Lebih/(kurang)		Rp85.294.926.211,75

(5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp14.091.100.023,33 dengan rincian sebagai berikut :



a. Anggaran penerimaan pembiayaan		
setelah perubahan	Rp192.732.542.895,10	
b. Realisasi	<u>Rp206.823.642.918,43</u>	
Selisih Lebih/(kurang)		Rp14.091.100.023,33
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan		
setelah perubahan	Rp0,00	
b. Realisasi	<u>Rp0,00</u>	
Selisih Lebih/(kurang)		Rp.0,00
(7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp14.091.100.023,33 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran pembiayaan netto		
setelah perubahan	Rp192.732.542.895,10	
b. Realisasi	<u>Rp206.823.642.918,43</u>	
Selisih Lebih/(kurang)		Rp14.091.100.023,33

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp114.068.610.749,10
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp99.386.026.235,08

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp1.691.506.943.232,61
b. Jumlah kewajiban	Rp3.562.600.613,00
c. Jumlah ekuitas	Rp1.687.944.342.619,61

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional	Rp84.765.874.307,90
b. Kegiatan Non Operasional	(Rp3.182.623.386,16)
c. Pos Luar Biasa	Rp0,00

Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp81.583.250.921,74

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2020	Rp107.824.159.671,10
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp141.711.055.377,99
c. Arus Kas Aktivitas Investasi	(Rp155.107.819.700,34)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan /Pembiayaan	Rp0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non anggaran	(Rp50.317.836,00)
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember tahun 2020	Rp94.377.077.512,75

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp1.618.197.176.549,68
b. Surplus/Defisit LO	Rp81.583.250.921,74
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	<u>(Rp11.836.084.851,81)</u>
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp1.687.944.342.619,61

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp206.823.642.918,43
b. Pengeluaran	Rp 0,00
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp206.823.642.918,43</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 99.386.026.235,08

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

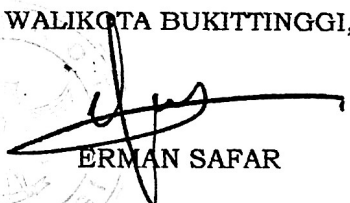
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 6 Agustus 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

  
ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 6 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

  
SETRISMAL HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR ...24....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah, dimana berdasarkan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan paling sedikit meliputi :

- a. Laporan realisasi anggaran
- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c. Neraca;
- d. Laporan operasional;
- e. Laporan arus kas;
- f. Laporan perubahan ekuitas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR...&.....

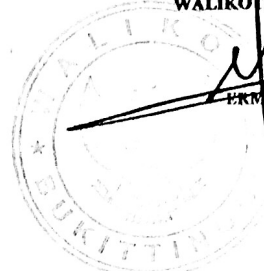


PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019  
(AUDITED)

Kode Rekening	Uraian	Ref	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020 Audited	%	Realisasi 2019 Audited
1	2	3	4	5	6-5/4	7
4	PENDAPATAN - LRA	5.1.4	698.981.742.486,00	689.222.919.606,62	99,75	734.106.696.896,05
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.1.4.1	77.233.287.538,00	84.087.662.500,62	108,88	111.896.596.611,05
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.4.1.1	31.278.967.000,00	35.857.033.610,00	114,64	45.204.119.636,50
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.4.1.2	24.474.011.211,00	21.833.603.342,00	89,21	33.125.468.779,75
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.4.1.3	6.331.956.191,00	6.331.956.191,00	100,00	6.071.910.132,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.4.1.4	15.148.273.128,00	20.065.069.357,62	132,46	27.495.098.062,80
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.4.2	592.402.984.956,00	585.094.336.619,00	98,77	607.228.300.285,00
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERKIMBANGAN		511.837.358.500,00	503.508.158.910,00	98,37	552.063.924.512,00
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.4.2.1	14.004.452.329,00	13.375.196.433,00	95,51	7.567.431.880,00
4.2.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.4.2.2	2.803.307.221,00	1.948.433.875,00	69,50	1.578.241.560,00
4.2.3	Dana Alokasi Umum	5.1.4.2.3	430.965.335.000,00	429.026.323.000,00	99,55	464.187.531.000,00
4.2.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.4.2.4	23.989.760.000,00	21.016.688.521,00	87,61	41.148.696.668,00
4.2.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.4.2.5	40.074.503.950,00	38.141.517.081,00	95,18	37.582.023.404,00
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA		56.127.000.000,00	56.127.000.000,00	100,00	26.013.224.000,00
4.2.6	Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	5.1.4.2.6	56.127.000.000,00	56.127.000.000,00	100,00	26.013.224.000,00
4.2.7	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		24.438.546.456,00	25.459.097.709,00	104,18	29.151.151.773,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.4.2.7	24.438.546.456,00	25.459.097.709,00	104,18	29.151.151.773,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.4.3	21.345.550.000,00	20.040.920.487,00	93,89	14.981.800.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah		21.345.550.000,00	20.040.920.487,00	93,89	14.981.800.000,00
5	BELANJA DAERAH	5.1.5	882.978.637.855,10	795.954.479.299,97	90,14	716.528.264.978,33
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.5.1	573.507.985.436,10	515.151.376.193,13	89,82	528.444.715.821,46
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.5.1.1	379.536.027.596,00	360.230.406.322,57	94,91	362.187.753.715,82
5.1.2	Belanja Barang	5.1.5.1.2	149.565.919.990,10	116.356.834.683,56	77,80	150.771.650.352,64
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.5.1.3	42.047.596.250,00	37.699.077.187,00	89,66	12.651.151.753,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.5.1.4	2.358.441.600,00	865.058.000,00	36,68	2.834.160.000,00
5.2	BELANJA MODAL	5.1.5.2	260.642.165.432,00	249.317.613.815,34	95,66	187.986.455.096,79
5.2.1	Belanja Modal Tanah		10.558.000.000,00	9.377.400.000,00	88,82	8.026.755.500,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		58.777.989.054,00	55.422.312.036,00	94,29	20.006.392.285,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		157.947.877.408,00	155.245.208.595,15	98,29	114.245.050.879,55
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		31.354.492.370,00	27.342.160.697,19	87,20	43.403.311.053,24
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		2.003.806.600,00	1.930.532.487,00	96,34	2.304.945.379,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.5.3	48.828.486.987,00	31.485.489.291,50	64,48	97.094.060,08
5.3.1	Belanja Tidak Terduga		48.828.486.987,00	31.485.489.291,50	64,48	97.094.060,08
6	TRANSFER		735.647.526,00	706.056.990,00	95,98	559.301.924,50
6.2	TRANSFER BANTUAN KEJANGAN	5.1.7	735.647.526,00	706.056.990,00	95,98	559.301.924,50
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya					
6.2.3	Belanja Bantuan Keuangan Lainnya		735.647.526,00	706.056.990,00	95,98	559.301.924,50
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		883.714.285.381,10	796.660.536.289,97	90,15	717.087.566.902,83
	SURPLUS/(DEFISIT)		(192.732.542.895,10)	(107.437.616.683,35)	55,74	17.019.129.993,22
7	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.8	192.732.542.895,10	206.823.642.918,43	107,31	97.049.480.755,88
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.8.1	192.732.542.895,10	206.823.642.918,43	107,31	97.049.480.755,88
7.1.1	Penggunaan SilPA tahun sebelumnya		107.773.841.835,10	107.773.841.835,10	100,00	88.590.322.797,88
7.1.2	Pencairan Dana Cadangan		84.958.701.060,00	99.049.801.083,33	116,59	8.459.157.958,00
	PEMBIAYAAN NETTO		0,00	99.049.801.083,33	0,00	114.068.610.749,10
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)					

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bukittinggi, 6 Agustus 2021  
WALIKOTA BUKITTINGGI



PRMAN SAFAR





**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
**(AUDITED)**

Uraian	Ref.	2020 Audited	2019 Audited
1	2	3	4
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2	114.068.610.749,10	95.915.280.573,88
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
Penggunaan SAI, sebagai Pemcrinaan Pembiayaan Tahun Berjalan		107.773.841.835,10	88.590.372.797,88
Subtotal		6.294.768.914,00	7.324.957.776,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		99.386.026.235,08	114.068.610.749,10
Subtotal		105.680.795.149,08	121.393.568.525,10
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
Lain-lain (jasa giro dana cadangan)		(6.294.768.914,00)	(7.324.957.776,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir		99.386.026.235,08	114.068.610.749,10

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bukittinggi, Agustus 2021  
**WALIKOTA BUKITTINGGI**

  
**ERMAN SAFAR**





**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
**(AUDITED)**

URAIAN	Ref	2020 Audited	2019 Audited
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>5.5.1</b>	<b>141.711.055.377,99</b>	<b>204.415.382.257,01</b>
Arus Masuk Kas		<b>689.053.977.852,62</b>	<b>733.516.494.063,05</b>
Penerimaan Pajak Daerah		35.857.033.610,00	45.204.119.636,50
Penerimaan Retribusi Daerah		21.833.603.342,00	33.125.468.779,75
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		6.331.956.191,00	6.071.910.132,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		19.896.127.603,62	26.904.895.229,80
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		13.375.196.433,00	7.567.431.880,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.948.433.875,00	1.578.241.560,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		429.026.323.000,00	464.187.531.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		59.158.205.602,00	78.730.720.072,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian		56.127.080.000,00	26.013.224.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak		25.459.097.709,00	29.151.151.773,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Lainnya		-	-
Penerimaan Bantuan Keuangan Dari Provinsi		-	-
Penerimaan Hibah		20.040.920.487,00	14.981.800.000,00
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan Lainnya		-	-
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		<b>689.053.977.852,62</b>	<b>733.516.494.063,05</b>
Arus Keluar Kas		<b>547.342.922.474,63</b>	<b>529.101.111.806,04</b>
Pembayaran Pegawai		320.950.770.496,57	362.187.753.715,82
Pembayaran Barang dan Jasa		156.083.978.509,56	150.771.650.352,64
Pembayaran Bunga		-	-
Pembayaran Subsidi		-	-
Pembayaran Hibah		37.699.077.187,00	12.651.151.753,00
Pembayaran Bantuan Sosial		417.550.000,00	2.834.160.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		706.056.990,00	559.301.924,50
Pembayaran Tidak Terduga		31.485.489.291,50	97.094.060,08
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		-	-
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		-	-
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		<b>547.342.922.474,63</b>	<b>529.101.111.806,04</b>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		<b>141.711.055.377,99</b>	<b>204.415.382.257,01</b>

URAIAN	Ref	2020 Audited	2019 Audited
<b>ARUS KAS AKIVITAS INVESTASI</b>	<b>5.5.2</b>	<b>(155.107.819.700,34)</b>	<b>(185.231.863.219,79)</b>
Arus Masuk Kas			
Pencairan Dana Cadangan		99.218.742.837,33	9.049.360.791,00
Penjualan Penjualan atas Tanah		99.049.801.083,33	8.459.157.958,00
Penjualan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		34.300.000,00	284.990.056,00
Penjualan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan		134.641.754,00	305.212.777,00
Penjualan Atas Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Penjualan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya			
Penjualan dari Penjualan Aset Lainnya			
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen			
Jumlah Arus Masuk Kas		99.218.742.837,33	9.049.360.791,00
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		254.326.562.537,67	194.281.224.010,79
Perolehan Tanah		5.008.948.722,33	6.294.768.914,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		9.377.400.000,00	8.026.755.500,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		55.422.312.036,00	20.006.392.285,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		155.245.208.595,15	114.245.050.879,55
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		27.342.160.697,19	43.403.311.053,24
Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.930.532.487,00	2.304.945.379,00
Perolehan Aset Lainnya			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		254.326.562.537,67	194.281.224.010,79
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Investasi Non Keuangan		(155.107.819.700,34)	(185.231.863.219,79)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/ PEMBIAYAAN</b>	<b>5.5.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Arus Masuk Kas			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-

URAIAN	Ref	2020 Audited	2019 Audited
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pembiayaan		-	-
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/ NONANGGARAN</b>	<b>5.5.4</b>	<b>(50.317.836,00)</b>	<b>48.790.563,00</b>
Arus Masuk Kas		<b>6.019.970.367,00</b>	<b>12.975.503.469,00</b>
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		6.019.970.367,00	12.925.185.633,00
Utang Pajak		-	8.528.400,00
BOS Tahun yang Lalu		-	41.789.436,00
Setoran UP/Kas bendahara		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		<b>6.019.970.367,00</b>	<b>12.975.503.469,00</b>
Arus Keluar Kas		<b>6.070.288.203,00</b>	<b>12.926.712.906,00</b>
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		6.019.970.367,00	12.925.185.633,00
Utang Pajak		8.528.400,00	-
BOS Tahun yang Lalu		41.789.436,00	-
Setoran UP/Kas bendahara		6.070.288.203,00	12.926.712.906,00
Jumlah Arus Keluar Kas		<b>(50.317.836,00)</b>	<b>48.790.563,00</b>
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Transitoris		<b>(13.447.082.158,35)</b>	<b>19.232.309.600,22</b>
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	<b>5.5.5</b>	<b>107.824.159.671,10</b>	<b>88.591.850.070,88</b>
Saldo Awal Kas		94.377.077.512,75	107.824.159.671,10
Saldo Akhir Kas		12.657.000,00	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	41.789.436,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		408.505.258,83	398.486.785,83
Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP		4.256.109.268,00	1.985.919.171,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS		89.699.805.985,92	105.397.964.278,27
Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah		-	-

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bukittinggi, 6 Agustus 2021  
WALIKOTA BUKITTINGGI

  
ERMAN SAFAR



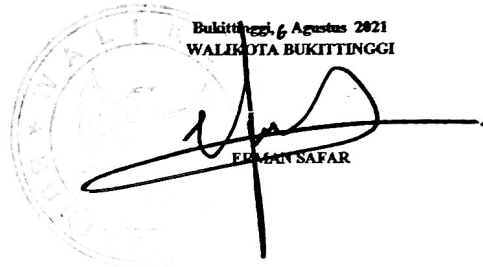
**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
**(AUDITED)**

URAIAN	Ref	2020 Audited	2019 Audited
1	2	3	4
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>5.4.1</b>		
<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.4.1.1</b>		
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.4.1.1.1</b>		
Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1.1	37.559.084.588,00	46.119.763.984,50
Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.1.2	21.100.926.252,00	36.989.729.454,75
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Dipisahkan	5.4.1.1.1.3	11.532.926.409,00	6.390.933.156,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	5.4.1.1.1.4	20.451.802.840,94	27.923.333.149,80
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		<b>90.644.740.089,94</b>	<b>117.423.759.745,05</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.4.1.1.2</b>		
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>			
Dana Bagi Hasil Pajak		11.734.934.663,00	11.409.413.396,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		2.095.180.600,00	2.063.700.856,00
Dana Alokasi Umum		429.026.323.000,00	464.187.531.000,00
Dana Alokasi Khusus Fisik		21.016.688.521,00	41.148.696.668,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik		38.141.517.081,00	37.582.023.404,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		<b>502.014.643.865,00</b>	<b>556.391.365.324,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>			
Dana Otonomi Khusus		-	-
Dana Penyesuaian		56.127.080.000,00	26.013.224.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		<b>56.127.080.000,00</b>	<b>26.013.224.000,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		30.499.477.914,00	26.663.037.234,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		<b>30.499.477.914,00</b>	<b>26.663.037.234,00</b>
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>		<b>588.641.201.779,00</b>	<b>609.067.626.558,00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5.4.1.1.3</b>		
Pendapatan Hibah		24.640.099.002,00	19.553.711.198,00
Pendapatan Dana Darurat		-	-
Pendapatan Lainnya		-	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah		<b>24.640.099.002,00</b>	<b>19.553.711.198,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>703.926.040.870,94</b>	<b>746.045.097.501,05</b>
<b>BEBAN</b>	<b>5.4.1.2</b>		
Beban Pegawai	5.4.1.2.1	362.413.714.337,57	362.116.899.788,82
Beban Persediaan	5.4.1.2.2	67.737.342.822,25	53.026.771.174,79
Beban Jasa	5.4.1.2.3	38.185.838.939,37	39.838.210.022,03
Beban Pemeliharaan	5.4.1.2.4	18.343.192.414,04	16.376.877.486,55
Beban Perjalanan Dinas	5.4.1.2.5	20.101.492.862,00	41.087.715.265,00
Beban Bunga		-	-
Beban Subsidi		-	-
Beban Hibah	5.4.1.2.6	38.654.566.594,18	15.427.547.753,00
Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.7	823.580.727,00	2.834.160.000,00
Beban Penyusutan	5.4.1.2.8	67.590.516.574,37	70.955.925.497,56
Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.9	3.050.516.870,24	2.646.364.221,31
Beban Lain-lain	5.4.1.2.10	1.553.347.432,02	1.821.585.150,00
Beban Transfer	5.4.1.2.11	706.056.990,00	559.301.924,50
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>619.160.166.563,04</b>	<b>606.691.358.283,56</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>		<b>84.765.874.307,90</b>	<b>139.353.739.217,49</b>

URAIAN	Ref	2020 Audited	2019 Audited
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	5.4.2		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Defisit Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		(3.182.623.386,16)	(9.511.408.609,99)
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>(3.182.623.386,16)</b>	<b>(9.511.408.609,99)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>81.583.250.921,74</b>	<b>129.842.530.607,50</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	5.4.3		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	(51.008.060,08)
<b>POS LUAR BIASA</b>		-	<b>(51.008.060,08)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>		<b>81.583.250.921,74</b>	<b>129.791.522.547,42</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bukittinggi, 6 Agustus 2021  
WALIKOTA BUKITTINGGI



ERMAN SAFAR





**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
**(AUDITED)**

No.	Uraian	Ref	2020 Audited	2019 Audited
1	2	3	4	5
	<b>ASET</b>			
	<b>ASET LANCAR</b>	<b>5.3.1</b>	<b>1.691.506.943.232,61</b>	<b>1.620.883.912.558,68</b>
	<b>ASET LANCAR</b>	<b>5.3.1.1</b>	<b>120.718.036.600,78</b>	<b>125.154.639.140,84</b>
	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	89.699.805.985,92	105.397.964.278,27
	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	12.657.000,00	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	-	41.789.436,00
	Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.1.4	408.505.258,83	398.486.785,83
	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.1.5	4.256.109.268,00	1.985.919.171,00
	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.6	-	-
	Investasi Jangka Pendek		-	-
	Piutang Pajak	5.3.1.1.2.1	12.238.550.579,00	15.073.995.147,00
	Penyisihan Piutang Pajak		(6.729.477.159,23)	(9.715.205.060,41)
	Piutang Pajak Netto		5.509.073.419,77	5.358.790.086,59
	Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.2	6.813.435.335,00	7.148.405.718,00
	Penyisihan Piutang Retribusi		(5.867.406.595,00)	(4.727.119.680,00)
	Piutang Retribusi Netto		946.028.740,00	2.421.286.038,00
	Piutang Lain-lain PAD		1.659.774.244,00	2.235.082.914,13
	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD		(980.640.013,07)	(1.598.387.961,65)
	Piutang Lain-Lain PAD Netto		679.134.230,93	636.694.952,48
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-dana perimbangan		2.607.213.546,00	4.327.440.812,00
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah lainnya		5.040.380.205,00	-
	Beban dibayar dimuka		-	26.666.666,67
	Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.4	6.243.070.255,00	319.023.024,00
	Penyisihan Piutang Lainnya		(1.062.930.451,00)	-
	Piutang Lainnya Netto		5.180.139.804,00	319.023.024,00
	Persediaan	5.3.1.1.3	6.378.989.142,33	4.240.577.890,00
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>120.718.036.600,78</b>	<b>125.154.639.140,84</b>
			-	-
	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.1.2.2</b>	<b>53.636.088.465,20</b>	<b>54.703.918.021,01</b>
	Investasi Non Permanen	5.3.1.2.2.1	680.825.369,00	656.898.362,00
	Dana Bergulir		680.825.369,00	656.898.362,00
	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>		<b>680.825.369,00</b>	<b>656.898.362,00</b>
	Investasi Permanen	5.3.1.2.2.2	52.955.263.096,20	54.047.019.659,01
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		52.955.263.096,20	54.047.019.659,01
	Investasi Permanen Lainnya	5.3.1.2.2.3	-	-
	<b>Jumlah Investasi Permanen</b>		<b>52.955.263.096,20</b>	<b>54.047.019.659,01</b>
	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>53.636.088.465,20</b>	<b>54.703.918.021,01</b>
			-	-
	<b>ASET TETAP</b>	<b>5.3.1.3</b>	<b>1.489.762.491.021,03</b>	<b>1.317.286.770.114,33</b>
	Tanah	5.3.1.3.1	566.869.523.505,20	556.681.517.906,20
	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	305.902.075.501,65	251.055.372.989,59
	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	628.543.049.143,26	462.615.080.229,50
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	602.123.677.315,77	575.789.671.612,64
	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	29.704.732.402,80	30.605.301.530,80
	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	67.625.951.326,72	94.626.821.145,35
	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(711.006.518.174,37)	(654.086.995.299,75)
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>1.489.762.491.021,03</b>	<b>1.317.286.770.114,33</b>
			-	-
	<b>DANA CADANGAN</b>	<b>5.3.1.4</b>	<b>26.756.453,00</b>	<b>94.067.608.814,00</b>
	Dana Cadangan		26.756.453,00	94.067.608.814,00
	<b>Jumlah Dana Cadangan</b>		<b>26.756.453,00</b>	<b>94.067.608.814,00</b>
			-	-

No	Uraian	Ref	2020 Audited	2019 Audited
1				
	<b>ASET LAINNYA</b>	5.3.1.5	27.363.570.692,60	29.670.976.468,50
	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
	Bagian Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.5.1	48.400.533,00	48.175.533,00
	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		-	-
	Tuntutan Ganti Rugi Netto		48.400.533,00	48.175.533,00
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		16.360.038.000,00	16.360.038.000,00
	Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.2	7.734.450.901,00	7.313.500.901,00
	Amortisasi Aset Tak Berwujud		(5.299.892.084,00)	(4.695.614.400,00)
	Aset Tak Berwujud Netto		2.434.558.817,00	2.617.886.501,00
	Aset Lain-Lain		45.312.446.938,45	35.317.544.461,96
	Akumulasi penyusutan aset lain-lain		(36.811.873.595,85)	(24.672.668.027,46)
	Aset Lain-Lain Netto	5.3.1.5.3	8.520.573.342,60	10.644.876.434,50
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>27.363.570.692,60</b>	<b>29.670.976.468,50</b>
			-	-
	<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1.691.506.943.232,61</b>	<b>1.620.883.912.558,68</b>
			-	-
	<b>KEWAJIBAN</b>	5.3.2	<b>3.562.600.613,00</b>	<b>2.686.736.009,00</b>
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	5.3.2.1	<b>3.562.600.613,00</b>	<b>2.686.736.009,00</b>
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	-	-
	Utang Kepada PT BPJS Kesehatan		-	-
	Utang Kepada PT Taspen		-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.2	999.500.000,00	999.500.000,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.3	487.985.484,00	334.985.663,00
	Utang Belanja	5.3.2.1.4	306.155.028,00	296.615.500,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.5	1.768.960.101,00	1.055.634.846,00
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>3.562.600.613,00</b>	<b>2.686.736.009,00</b>
			-	-
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	5.3.2.2	-	-
	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		-	-
	Utang Dalam Negeri - Obligasi		-	-
	Premium (diskonto) Obligasi		-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		-	-
			-	-
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>3.562.600.613,00</b>	<b>2.686.736.009,00</b>
			-	-
	<b>EKUITAS</b>	5.3.3	<b>1.687.944.342.619,61</b>	<b>1.618.197.176.549,68</b>
	Ekuitas		1.687.944.342.619,61	1.618.197.176.549,68
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>1.687.944.342.619,61</b>	<b>1.618.197.176.549,68</b>
			-	-
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>1.691.506.943.232,61</b>	<b>1.620.883.912.558,68</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bukittinggi, 4 Agustus 2021  
WALIKOTA BUKITINGGI

  
ERMAN SAFAR



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
**(AUDITED)**

URAIAN	Kef	2020 Audited	2019 Audited
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>5.6</b>	<b>1.618.197.176.549,68</b>	<b>1.438.711.727.365,00</b>
SURPLUS DEFISIT LO		81.583.250.921,74	129.791.322.547,42
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		(11.836.084.851,81)	49.694.126.637,26
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Koreksi Nilai Piutang		30.736.939,55	1.275.648.867,00
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang		-	39.939.072,48
Koreksi Nilai Aset Tetap		507.829.000,28	65.440.908.702,13
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap		(8.679.337.689,62)	(679.627.740,23)
Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(333.431.345,00)	(323.317.950,00)
Koreksi Nilai Aset Lain-lain		-	(16.230.654.259,58)
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain		(2.648.518.337,02)	243.929.162,46
Koreksi Nilai Utang		(713.325.255,00)	(72.699.217,00)
koreksi Ekuitas Lainnya		(38.165,00)	-
<b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>		<b>1.687.944.342.619,61</b>	<b>1.618.197.176.549,68</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bukittinggi, 6 Agustus 2021  
WALIKOTA BUKITTINGGI

  
ERMAN SAFAR